

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN DI PESANTREN UBAY BIN
KA'AB KLATEN
(STUDI KASUS DI PESANTREN GRATIS BIAYA)**



Oleh:

FAIZAH INDA ROBBI

1910638

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Prgram Studi Manajemen Pendidikan Islam

**SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
KEBUMEN
2021**

Nota Dinas Pembimbing

Kepada Yth,
Direktur Sekolah Pascasarjana
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Assalamu'alaikum wr, wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: Manajemen Pembiayaan Di Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten (Studi Kasus Di Pesantren Gratis Biaya)

Yang ditulis oleh :

Nama : Faizah Inda Robbi
NIM : 1910638
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Tahun Akademik : 2020/2021

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap tesis tersebut sebagai hasil penelitian/ kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke Sidang Munaqosyah Tesis Pascasarjana IAINU Kebumen.

Wassalamu'alaikum wr, wb

Kebumen, 30 Mei 2021
Pembimbing



Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I
NIDN. 213103850

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Di Pesantren Ubay Bin Ka’ab Klaten (Studi Kasus Di Pesantren Gratis Biaya)” telah dipertahankan di hadapan sidang dewan penguji tesis pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juni 2021
Pukul : 09.00 - 10.00 WIB

Oleh:

Nama : Faizah Inda Robbi
NIM : 1910638
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

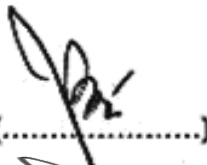


Dewan Penguji Tesis :

Ketua Sidang : Fikria Najitama, M.S.I

Sekretaris Sidang : Faisol, M. Ag

Penguji I : Dr. Imam Satibi, M.Pd.I

Penguji II : Dr. Sudadi, M.Pd.I

()
()
()

Kebumen, 17 Juni 2021

Sekolah Pascasarjana

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen

Direktur



Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I
NIDN. 213103850

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

MOTTO

﴿2﴾ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

﴿3﴾

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.¹

{QS. Ath-Thalaq [65]: 2-3}

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 558.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Tesis ini dipersembahkan kepada:

1. Almater Pascasarjana IAINU Kebumen.
2. Orangtua saya Ibu Mahfudhoh Eliyani dan Bapak Ahmad Mudhofir (Rahimahullah) serta kaka- kaka dan adik-adik saya yang telah memberikan segala dukungan serta doa yang tiada henti.
3. Seluruh sahabat-sahabatku yang telah mendukung dan membangkitkan semangat untuk menggapai cita-cita.
4. Keluarga besar Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab yang telah membantu proses penulisan penelitian ini dengan penuh kasih.
5. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dan motivasinya untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.

ABSTRAK

Faizah Inda Robbi, NIM 1910638. *Manajemen Pembiayaan Di Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten (Studi Kasus Di Pesantren Gratis Biaya)* Tesis, Program Pascasarjana IAINU Kebumen, 2021.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya manajemen dalam pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang membutuhkan biaya yang banyak. Pasalnya pesantren mempunyai asrama tinggal murid/santri, itu artinya biaya operasional pesantren tidak sebatas apa yang ada di dalam kelas namun berlanjut sampai dapur, asrama dan kegiatan harian. Namun biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten merupakan salah satu solusi bagi kalangan yatim-dhuafa karena merupakan Pesantren Gratis Biaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah manajemen pembiayaan Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten. Apa saja variannya dan juga faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembiayaan pendidikan, di lembaga tersebut meliputi penentuan rencana anggaran, sumber dananya dari donatur (tetap dan tidak tetap), dan penyusunan serta pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Pesantren. (2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan, meliputi dua kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Jenis pencatatan yang digunakan yaitu buku dan juga komputer. (3) Evaluasi pembiayaan pendidikan yakni baru evaluasi internal saja. Evaluasi internal dilakukan oleh yayasan yang meliputi evaluasi bulanan dan tahunan, sedangkan untuk evaluasi eksternal belum dilaksanakan. (4) Varian pembiayaannya ada operasional, personal dan investasi. (5) Faktor pendukungnya tingginya antusiasme donatur dalam mendonasikan dana. Faktor penghambatnya donatur baru yang belum terlalu paham dengan alur sistem pendonasian.

Kata kunci: Manajemen Pembiayaan, Pesantren Gratis.

ABSTRACT

Faizah Inda Robbi, NIM 1910638. *Financing Management In Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten (Case Study In Pesantren Gratis Biaya)* Thesis, IAINU Kebumen Postgraduate Program, 2021.

This research is motivated by the importance of management in education financing. Education financing is an essential and inseparable component in the implementation of the teaching and learning process. Pesantren is one of the educational institutions that require a lot of costs. Because pesantren has a dormitory residence students / students, it means the operational cost of pesantren is not limited to what is in the classroom but continues to the kitchen, dormitories and daily activities. But the cost is felt increasingly expensive. Moreover, from the underprivileged increasingly erratic economic conditions from day to day. Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten is one solution for orphans because it is a Free Boarding School. The purpose of this research is to find out how the financing management of Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten. What are the variants and also the supporting factors and inhibitors.

This research is descriptive qualitative research. Data collection is done using interview methods, observations, and documentation. The data analysis techniques in this study were conducted in three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study show that: (1) Education financing planning, in the institution includes the determination of budget plans, the source of funds from donors (fixed and non-fixed), and the preparation and ratification of the draft budget of income and expenditure (RAPB) Pesantren. (2) The implementation of education financing shall include two activities, namely the receipt of funds and expenditure of funds. The types of recording used are books as well as computers. (3) Evaluation of education financing is only internal evaluation. Internal evaluations are conducted by the foundation which includes monthly and annual evaluations, while external evaluations have not been implemented. (4) The financing variants are operational, personal and investment. (5) The supporting factor is the high enthusiasm of donors in donating funds. The inhibitory factor is new donors who are not too familiar with the flow of the donation system.

Keywords: Financing Management, Free Boarding School.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal




Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ^{''}	B	Be
ت	ta ^{''}	T	Te
ث	ša ^{''}	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa ^{''}	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^{''}	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^{''}	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa ^{''}	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa ^{''}	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa ^{''}	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka

ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha"	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap, dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

1		<i>Faḥah</i>	Ditulis	A
	Contoh	كُتِبَ	Ditulis	<i>Kataba</i>
2		<i>kasrah</i>	Ditulis	I
	Contoh	ذُكِرَ	Ditulis	<i>Žukira</i>
3		<i>ḍammah</i>	Ditulis	U
	Contoh	يُظَاهَبُ	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

2. Vokal Panjang

1	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2	<i>Faḥah + ya" mati</i>	ditulis	<i>Ā</i>
	نَسِي	ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya mati</i>	ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>Ū</i>

	فُرُودٌ	ditulis	<i>Furūd</i>
--	---------	---------	--------------

3. Vokal Rangkap (*diftong*)

1	<i>Faṭḥah</i> + ya mati	Ditulis	Ai
	كَيْفًا	Ditulis	<i>Kaifa</i>
2	<i>Faṭḥah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	حَوْلًا	Ditulis	<i>ḥaula</i>

C. *Ta' Marbū'ah*

1. Bila dimatikan tulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendakai lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harakat, *faṭḥah* atau *kasrah* atau *ḍammah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīr</i>
-------------------	---------	---------------------

D. *Syaddah* (*Tasydid*)

Untuk konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u 'iddat</i>
لأن سكرتم	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan besar kita Nabi

Muhammad SAW, sebagai sosok teladan tunggal dan memiliki akhlak paling mulia, yang diutus untuk membangun sebuah peradaban besar bagi terwujudnya rahmat bagi seluruh alam.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penyusunan tesis ini adalah berkat dorongan, arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Iman Satibi, M.Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.
2. Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen.
3. Dr. Sulis Rokhmawanto, M.S.I, selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Seluruh Staf dan Karyawan Sekolah Pascasarjana (SPs) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen yang juga turut membantu dalam berbagai urusan administrasi.
5. Ibunda Mahfuhoh Eliyani dan segenap keluarga yang memberikan bantuan baik berupa moril, materil selama penulis menempuh studi di SPs IAINU Kebumen

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan tesis ini. Akhirnya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangatlah penulis harapkan untuk penelitian selanjutnya.

Kebumen, 30 Mei 2021

Penulis

Faizah Inda Robbi

NIM 1910638

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Teori.....	14
1. Manajemen Pembiayaan	14
2. Pesantren	33
B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	50
C. Informan Penelitian	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Keabsahan Data	53
F. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Deskripsi Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Deskripsi Hasil Penelitian	65
C. Analisis Hasil Penelitian.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	108
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pengajar dan Pengurus di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab.....	60
Tabel 4.2 Data Santri di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab	60

Tabel 4.3 Jadwal Kegiatan Santri di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab	63
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Buku Pencatatan Pemasukan Dana	68
Gambar 4.2 Buku Pencatatan Pengeluaran Dana.....	68
Gambar 4.3 Rincian Varian Pembiayaan	71

Gambar 4.4 Kegiatan Makan Santri.....	72
Gambar 4.5 Ekskul Bela Diri	75
Gambar 4.6 Ekskul Memanah.....	75
Gambar 4.7 Kegiatan Piknik Santri	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pengajar dan Pengurus di Pesantren Gratis Ubay	
Bin Ka'ab	109

Lampiran 2 Daftar Santri di Pesantren Gratis Ubay Bin K'ab	110
Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi dan Observasi Penelitian	113
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Penelitian.....	114
Lampiran 5 Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran	117
Lampiran 6 Buku Catatan Keuangan	118
Lampiran 7 Dokumentasi di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab	120
Lampiran 8 Penetapan Dosen Pembimbing Tesis.....	128
Lampiran 9 Permohonan Ijin Penelitian	129
Lampiran 10 Surat Keterangan telah Penelitian.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi keberagaman kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan.

Jika kita mencermati dan ikuti perkembangan pendidikan khususnya dalam hal biaya pendidikan sampai saat ini, biaya tersebut dirasakan semakin mahal. Terlebih lagi, dari kalangan kurang mampu semakin tidak menentu kondisi perekonomiannya dari hari ke hari. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau disebabkan oleh karena hal yang lainnya. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah atau perguruan tinggi negeri maupun swasta. Di tingkat pendidikan dasar misalnya, sekalipun Pemerintah telah memberi dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD dan SMP negeri, namun dianggap oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya pendidikan, terutama biaya operasional pokok yang harus ditanggung oleh orangtua/wali peserta didik.²

Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung orangtua disebabkan banyaknya komponen biaya pendidikan yang menjadi beban orangtua, seperti biaya transportasi bagi siswa, biaya pembelian seragam, pembayaran SPP, dan lainnya. Alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk komponen biaya penunjang, yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana, seperti gaji guru, pengembangan fisik sekolah, serta pengadaan buku pelajaran.

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang esensial dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat

² Ferdi W.P, *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing Of Education: A Theoretical Study*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013, hlm. 566.

menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil guna. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program. Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003) bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Kata kunci tidak diskriminatif di sini berlaku untuk pembiayaan pendidikan, artinya bahwa pembiayaan pendidikan haruslah tidak mendiskriminatifkan setiap warga Negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya.

Khusus pembiayaan pada bidang pendidikan lewat undang-undang, pemerintah telah mengeluarkan aturan berkenaan dengan pembiayaan pendidikan, yaitu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, bab ke XIII Pasal 46-49, di mana di dalamnya dinyatakan tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan, di dalamnya juga dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat, dalam aturan ini jelas peran masyarakat tidak dapat di kesampingkan, masyarakat harus memberikan dukungan penuh terhadap pembiayaan pendidikan di daerah sekitar mereka, dan masyarakat juga harus dibedakan dengan keluarga/orang tua peserta didik, partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan daerah dan komite sekolah pada setiap lembaga pendidikan yang ada.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini sesuai amanat UUSPN Nomor 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen

memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu: a) peningkatan potensi SDM yang berkualitas; b) penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan; c) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; d) pengefektifan dan pengefisienan penggunaan dana; e) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan pendidikan; f) meminimalis terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan.³

Dalam konsep pembiayaan pendidikan sedikitnya ada tiga pernyataan yang terkait di dalamnya. Sebagaimana yang dikemukakan Thomas John, yaitu bagaimana uang diperoleh untuk membiayai lembaga pendidikan, dari mana sumbernya dan untuk apa dibelanjakan serta siapa yang membelanjakan.⁴

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro dikenal beberapa kategori biaya pendidikan. Pertama, biaya langsung (*direct cost*) adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kedua biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan dan harga kesempatan (*opportunity cost*).⁵

Selain dari hal di atas, Amhar (dalam Wibisono), berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) model pembiayaan pendidikan, yaitu: 1) subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi; 2) pendidikan gratis pendidikan tinggi diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu; 3) pendidikan gratis diberikan sampai SMA, dan pendidikan tinggi tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi; dan 4) semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri. Penggalan sumber dana dapat diperoleh dari upaya kerja sama dengan industri atau

³ Ferdi W.P, *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing Of Education: A Theoretical Study*, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 19, Nomor 4, Desember 2013, hlm. 567.

⁴ Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 23.

⁵ Badruttamam, *Manajemen Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam Nurul Karomah Bangkalan*, dalam *Jurnal Kabilah* Vol. 3 No. 1, Tahun 2018, hlm. 66.

memanfaatkan bantuan CSR (*corporate social responsibility*), membentuk komunitas alumni, atau bersumber dari orangtua/wali peserta didik.⁶

Telah banyak dibicarakan secara umum bahwa pendidikan yang berkualitas memerlukan banyak biaya untuk menunjang proses pembelajaran atau pembangunan sarana penunjang pembelajaran. Sesuai amanat undang-undang bahwa negara wajib untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana untuk biaya pendidikan para generasi bangsa. Namun, dalam kenyataannya biaya yang telah dialokasikan tersebut sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Sekolah dituntut berfikir kreatif bagaimana cara mengelola keuangan lembaga untuk menghasilkan output yang berkualitas. Banyak sekolah yang akhirnya menarik biaya mahal kepada siswa agar dapat menjadi sekolah unggul dan berkualitas. Namun masih ada sekolah yang dapat menggratiskan biaya pendidikan namun memiliki mutu yang baik.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pendidikan adalah dasar dalam pengembangan sumber daya manusia, daerah ataupun Negara maju karena mempunyai sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten. Kebijakan pendidikan gratis adalah solusi yang tepat untuk pendidikan kalangan orang yang kurang mampu. Dengan adanya anggaran khusus atau donatur, akan dapat terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik.

Pondok pesantren merupakan salah satu instansi pendidikan yang konsisten dalam pemberdayaan sumber daya manusia serta menjadi pusat studi keagamaan di kalangan masyarakat. Pesantren merupakan sebuah lembaga yang memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan kerangka sistem pendidikan nasional. Pada umumnya, pendidikan pesantren bertujuan menyebarkan ajaran-ajaran keagamaan sebagai benteng moral dan mental dalam menghadapi kemajuan zaman termasuk kemajuan ilmu dan teknologi.

Di era globalisasi yang penuh persaingan dan tantangan serta semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), mengharuskan lembaga pendidikan pondok pesantren untuk meningkatkan mutunya, sehingga dapat membina para santri yang sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat modern seperti sekarang ini sebagaimana yang penulis ketahui, sekarang ini telah banyak pondok pesantren yang membekali para santrinya tidak hanya dengan ilmu

⁶ Ferdi W.P, *Pembiayaan Pendidikan*. . . , hlm. 567.

agama tetapi juga dengan ilmu pengetahuan umum. Bahkan ada juga pondok pesantren yang membekali santrinya dengan berbagai macam ketrampilan.

Fakta menunjukkan pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang mampu hidup secara mandiri. Kemandirian itu tidak hanya dalam konsep pendidikan bagi para santrinya, tetapi juga dalam pengelolaan pesantren termasuk pendanaannya.⁷

Masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di lembaga pendidikan. Karena seluruh komponen pendidikan di pesantren erat kaitannya dengan komponen keuangan pesantren. Masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pesantren. Banyak pesantren yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji pengajar, menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran, maupun untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Pasalnya pesantren mempunyai asrama tinggal murid/santri, itu artinya biaya operasional pesantren tidak sebatas apa yang ada di dalam kelas namun berlanjut sampai dapur, asrama dan kegiatan harian.⁸

Pembiayaan operasional dalam pondok pesantren perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan pembiayaan dikenal dengan manajemen keuangan. Penyelenggaraan pondok pesantren memerlukan manajemen keuangan. Tidak saja terkait sumber dana yang mampu mencukupi kebutuhan operasional pondok, baik dari donatur maupun sumber yang lain. Keuangan pondok perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya visi dan tujuan pondok. Oleh karena itu, maka pondok pesantren tidak dapat lepas dari kegiatan manajemen pembiayaan dalam hal ini kegiatan tersebut meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan pesantren. Salah satu yang krusial dalam manajemen lembaga pendidikan adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan maupun evaluasinya. Pengelolaan pembiayaan penting diperhatikan lembaga pendidikan agar dapat mengembangkan mutu lembaga. Hal

⁷ Nur Eka Setiowati, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Terpadu Nurushiddiiq", dalam *Al-Amwal, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol.7 No. 2, 2015, hlm. 168.

⁸ Zusba Muctar, Syarifuddin Ondeng, Moh. Wayong, "Manajemen Pembiayaan Operasional Pesantren Tahfizul Quran Imam Al-Syaatibi Bontoabaddo Gowa", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.4 No. 3, Desember 2016, hlm. 581.

tersebut diatur Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

Dalam mengelola keuangan lembaga pendidikan seyogyanya pondok pesantren melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi sehingga pengelolaan keuangan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁹ Apabila sistem pengelolaan keuangan pendidikan dilakukan dengan baik maka kebutuhan pendidikan serta hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pesantren akan terpenuhi.

Untuk mengelola pembiayaan di pondok pesantren, setidaknya menurut Rusdiana bahwasanya manajemen pembiayaan memiliki tiga tahapan atau urutan kerja dalam manajemen pembiayaan yaitu tahap perencanaan biaya (*budgeting*), tahap pengelolaan penggunaan biaya (*accounting*), dan tahap pertanggungjawaban (*evaluating*). Tahap perencanaan yakni kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan. Pelaksanaan yakni kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Evaluasi yakni penilaian terhadap pencapaian tujuan.¹⁰

Hal yang demikian agar adanya struktur administrasi pembiayaan dalam proses kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren yang sesuai dengan tujuan dan tidak adanya penyelewengan atau pelanggaran dalam penggunaan biaya.

Dewasa ini, semakin maraknya para orangtua yang ingin anaknya merasakan pendidikan pesantren dengan kurikulum kekinian dan memperoleh berbagai macam soft skill di luar ilmu keagamaan, dan bisa memilih pesantren modern. Pondok pesantren seperti ini biasanya memiliki program yang memberikan garansi agar para lulusannya bisa melanjutkan studi di luar negeri. Misalnya seperti program tahfidz dan bahasa Arab. Pesantren-pesantren modern ini tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Ada beberapa estimasi biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan diantaranya ada biaya masuk atau uang pangkal mulai dari Rp.10 juta hingga Rp.30 juta, biaya boarding bulanan (termasuk makan, laundry, SPP dan sebagainya)

⁹ Andhika Sakti dan Ara Hidayat, *Manajemen Sumber Dana Dan Alokasi Pembiayaan Pada Pesantren Mahasiswa*, Jurnal Perspektif Vol. 3 No. 2, Tahun 2019, hlm. 124.

¹⁰ Rusdiana dan Wardija, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Konsep, Prinsip dan Aplikasi di Sekolah/Madrasah*, (Bandung: Arsd Press, 2013), hlm. 3.

mulai dari Rp.2 juta, biaya buku, kegiatan ekstra kurikuler dan sebagainya, mulai dari Rp.2 juta, biasanya dibayarkan per semester. Bahkan pesantren modern yang memiliki kelas internasional ada yang menetapkan SPP nya hingga 20 jutaan per bulan. Biasanya yang masuk ke pesantren jenis ini adalah kalangan ekonomi atas.

Besarnya biaya biasanya dipengaruhi jenjang pendidikan, lokasi dan akreditasi sekolah, dan popularitas sekolah. Pesantren modern yang belum begitu populer dan belum memberikan garansi lulusannya diterima di kampus luar negeri biasanya kisaran biaya masuk masih di bawah Rp.10 juta. Termasuk juga uang SPP nya yang bisa lebih murah di bawah Rp.1 juta.¹¹

Besarnya biaya tersebut merupakan sebuah kendala bagi kalangan ekonomi menengah dan kebawah. Oleh karenanya ada alternatif lain apabila menginginkan anaknya tetap menempuh pendidikan di pesantren yakni pesantren tradisional. Dalam segi pembiayaan tentunya pesantren tradisional tidak semahal biaya di pesantren modern. Walaupun tradisional, bukan berarti lulusan pesantren ini kurang memiliki kompetensi. Biasanya fokus penekanannya pada kurikulum Islam yang lebih kuat.

Seiring berjalannya waktu, ada pula beberapa pesantren yang menggratiskan biaya bagi para santrinya. Kebijakan pendidikan gratis di pondok pesantren dilatar belakangi oleh penyebaran pendidikan berbasis Islam yang kurang merata sehingga tidak bisa dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan terutama kalangan kurang mampu. Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan sokongan dana kepada anak-anak mereka yang mencari ilmu di pondok pesantren juga menjadi dorongan dalam menerapkan kebijakan pendidikan gratis ini. Selain itu, terdapat keinginan yang kuat dalam diri para santri yang kurang mampu secara finansial untuk tetap melanjutkan belajar mereka di pondok pesantren. Dari beberapa alasan tersebut dapat menjadi pendorong untuk menerapkan kebijakan pendidikan gratis di lingkungan pondok pesantren.

Pondok pesantren gratis adalah pondok pesantren yang menggunakan sistem gratis tanpa memungut biaya sedikitpun kepada santri tetapi tetap menjamin sarana dan prasarana kepada santri. Pondok pesantren gratis Ubay bin Ka'ab menjadi salah satu pondok pesantren yang begitu mempertimbangkan manajemen kelembagaannya dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Salah satu wujud kepeduliannya pondok pesantren gratis ini terhadap santrinya yaitu dengan menyediakan berbagai fasilitas seperti: asrama gratis, makan gratis, uang gedung gratis, SPP

¹¹ <https://pintek.id/blog/biaya-masuk-pondok-pesantren/> diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

gratis, seragam gratis. Intinya tidak dipungut biaya sepeserpun. (Dokumen, Brosur Pendaftaran Santri Baru).

Pesantren gratis Ubay bin Ka'ab merupakan lembaga pendidikan non pemerintah di bawah pembinaan dan pengawasan Yayasan Bina Insani. Pesantren ini awal berdiri pada tanggal 01 bulan Juni tahun 2018. Dengan bertempat di Desa Tempel RT 1, RW 5 kelurahan Jebugan, kecamatan Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. Pesantren gratis ini dihadiahkan untuk anak-anak yatim dan kaum dhuafa di seluruh pelosok Indonesia, agar mereka juga mampu mengenyam pendidikan yang layak seperti orang-orang pada umumnya.¹²

Sebagai pesantren swasta dan juga masih dalam tahap perkembangan, sistem pembiayaan pendidikan di Pesantren gratis Ubay bin Ka'ab tentunya terdapat perbedaan dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain yang telah lebih mapan, terutama sekolah-sekolah negeri maupun sekolah swasta yang sudah berkembang. Hal tersebut jelas dikarenakan pesantren ini tidak menarik biaya sepeserpun kepada santri dan wali santrinya. Pesantren ini memiliki sumber dana dari beberapa donatur tetap dan tidak tetap yang bersedia menanggung biaya operasional pondok pesantren.

Meskipun pihak pondok tidak menarik biaya kepada santri ataupun wali santrinya dan biaya/dana hanya bersumber dari para donatur, namun saat masyarakat mulai menyadari bahwa pesantren itu memenuhi harapan dan pertimbangan mereka, mulailah dukungan demi dukungan diberikan. Mereka menyumbangkan apa yang mereka miliki sebatas kemampuan mereka, sesedikit apa pun dan dalam bentuk apa pun tanpa rasa malu. Hal ini terjadi karena masyarakat merasakan manfaat kehadiran pesantren, atau bahkan mereka merasa bahwa pesantren adalah bagian dari mereka. Demikian pula yang dilakukan para santri.

Disinilah salah satu permasalahan yang akan menjadi perhatian dalam penelitian ini yakni apa yang menjadi pembeda manajemen pembiayaan operasional di Pesantren gratis Ubay bin Ka'ab dengan pesantren lainnya yang sudah berkembang dan juga yang menarik biaya. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan menganalisis berbagai persoalan yang terkait dengan manajemen pembiayaan operasional di Pesantren gratis Ubay bin Ka'ab. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai manajemen pembiayaan di Pesantren gratis Ubay bin Ka'ab.

¹² Wawancara dengan Ustadz Ashali ketua Yayasan, via Whatsapp tanggal 17 November 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah manajemen pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab?
2. Apa saja varian pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab.
2. Untuk mengetahui varian pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep atau teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Pada kesempatan kali ini, diharapkan penelitian dapat menambah khazanah pengetahuan kita tentang manajemen pembiayaan di pesantren gratis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab: memberikan masukan dan pemikiran yang transformatif tentang manajemen pembiayaan pendidikan agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Selain itu sebagai sumber tambah wawasan, bahan introspeksi

semua pihak pesantren sudah sejauh mana berkontribusi dalam manajemen pembiayaan pendidikan yang telah dilaksanakan.

- b. Bagi pembaca: Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya manajemen pembiayaan pendidikan khususnya di pesantren gratis. Serta dapat menjadi referensi kepustakaan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi peneliti: Sebagai pengalaman belajar yang sangat berharga untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen pembiayaan dan hal lainnya tentang kepesantrenan serta dapat dijadikan bekal untuk masa kedepannya bagaimana dalam melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan serta manajemen pendidikan secara keseluruhan yang baik sebagai bentuk pengamalan ilmu yang telah didapatkan di kampus IAINU Kebumen.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam mencari dan memahami isi tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bagian awal tesis terdiri dari halaman judul, nota dinas pembimbing, lembar pengesahan, pernyataan orisinalitas/keaslian, motto, persembahan, abstrak, pedoman transliterasi Arab, kata pengantar dan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori berisi tentang pokok bahasan mengenai manajemen pembiayaan di pesantren. Hal tersebut meliputi, Pengertian Manajemen Pembiayaan (pengertian manajemen pembiayaan, langkah dan prinsip pembiayaan), Pengertian Pesantren (pengertian pesantren, unsur-unsur di dalamnya serta jenis pesantren saat ini). Pada bab dua ini juga ada kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab ketiga adalah metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi/tempat dan waktu penelitian, informan/subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah gambaran umum mengenai Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab, penyajian data dan analisis data mengenai manajemen pembiayaan pendidikan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan saran-saran yang ditujukan untuk pihak terkait.

Kemudian di bagian akhir tesis ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Manajemen Pembiayaan

Manajemen pembiayaan ini terdiri dari dua suku kata yakni manajemen dan pembiayaan. Sebelum membahas mengenai manajemen pembiayaan secara lebih luas, maka penulis akan mengemukakan terlebih dahulu makna dari manajemen dan pembiayaan itu sendiri.

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris, kata *to manage*, dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *manage* dijelaskan berasal dari bahasa Italia “*managgio*” dari kata “*managgiare*” dan kata ini berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti tangan (*hand*). Kata *manage* dalam kamus tersebut diberi arti: membimbing dan mengawasi, memperlakukan dengan seksama, mengurus perniagaan atau urusan-urusan, mencapai tujuan tertentu.¹³ Manajemen merupakan proses memperoleh suatu tindakan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada beberapa pengertian manajemen menurut para ahli.

Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *al-tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al Qur'an seperti firman Allah SWT, salah satunya dalam surat As-Sajdah ayat 5¹⁴:

يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (Q.S. As-Sajdah [32] : 5).¹⁵

Dari isi kandungan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam (*al-Mudabbir/manager*). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan Allah telah dijadikan

¹³ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2004), hlm. 37.

¹⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm. 362.

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), hlm. 415.

sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.¹⁶

Hersey dan Blanchard sebagaimana dikutip oleh Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, mengemukakan "*management is a process of working with and through individuals and groups and other resources to accomplish organizational goals*". Proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah, industri dan lain-lain.¹⁷

Menurut Daft dan Marcic *management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading, and controlling organizational resources*. Definisi ini menjelaskan bahwa manajemen merupakan pencapaian sasaran organisasi secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan serta pengawasan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi.¹⁸

Sejumlah unsur pokok yang membentuk kegiatan manajemen, yaitu: Unsur manusia (*men*), barang-barang (*materials*), mesin (*machines*), metode (*methods*), uang (*money*) dan pasar atau (*market*). Keenam unsur ini memiliki fungsi masing-masing dan saling berinteraksi atau mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi terutama proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.¹⁹

Efisien ialah hubungan antara *input* (masukan) dengan *output* (keluaran). Jika hasil yang dicapai lebih banyak daripada input (masukan/modal) yang dikeluarkan maka hal itu dimaksudkan sebagai efisien. Manakala seorang manajer memanfaatkan sumber daya masukan seperti, uang, orang, dan peralatan dapat dihemat/diminimalisir untuk mencapai suatu tujuan merupakan

¹⁶Ahmad Munir, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Perspektif Islam, dalam *Jurnal At-Ta'dibb*, Vol.8 No.2, 2013, hlm. 15

¹⁷ Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, *Dasar-Dasar Manajemen, Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), hlm. 15.

¹⁸ Syafaruddin, *Manajemen Organisasi Pendidikan Perspektif Sains dan Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 34.

¹⁹ Syafaruddin, *Manajemen Organisasi Pendidikan*. . . , hlm. 35.

hakikat efisiensi. Sedangkan efektif adalah pencapaian aktivitas secara sempurna sesuai tujuan yang akan dicapai. Pencapaian tujuan organisasi atau kegiatan tertentu berkaitan dengan tingkat efektivitas.

Semua kegiatan yang memberikan *output* yang berkualitas tidak luput dari adanya ketersediaan biaya. Pengertian biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu, ongkos belanja, dan pengeluaran. Sedangkan definisi pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan.²⁰

Biaya pendidikan adalah salah satu komponen instrumental (*instrumental input*) yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang, dan tenaga.

Abuddin Nata menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan, dan sebagainya.²¹

Matin mendefinisikan biaya pendidikan sebagai seluruh pengeluaran baik yang berupa uang maupun bukan uang sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak yakni masyarakat, orangtua, dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan agar tujuan serta cita-cita yang sudah ditentukan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya biaya pendidikan harus

²⁰ Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 7.

²¹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 219.

digali dari berbagai sumber, dipelihara, dikonsolidasikan dan ditata secara administratif sehingga dilaksanakan secara efektif dan efisien.²²

Dari beberapa definisi tersebut, pembiayaan pendidikan dapat dipahami sebagai ongkos atau biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk uang, barang, dan tenaga. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan sukar berjalan dengan lancar.

Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan antara lain seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan secara individual dan sambil dalam situasi ilmu pengetahuan yang belum berkembang, menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu dan pengetahuan yang sudah mulai berkembang. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar mengajar tidak dapat lagi dilakukan secara sambil dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada seperti masjid atau bagian tertentu dari rumah guru, melainkan sudah memerlukan tempat yang khusus, sarana prasarana, infrastruktur, guru, dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus.²³

Dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, ada dua hal penting yang harus dikaji dan dianalisis, yaitu biaya pendidikan total secara keseluruhan (*total cost*) dan biaya pendidikan setiap personal siswa (*unit cost*). Total cost merupakan biaya *aggregate* biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah, orang tua dan masyarakat yang dikeluarkan untuk kegiatan kependidikan dalam satu tahun pelajaran. Sedangkan biaya satuan merupakan ukuran yang menggambarkan besaran alokasi pembiayaan pendidikan setiap siswa untuk mendapatkan fasilitas kependidikan di sekolah secara efektif dan efisien.²⁴

²² Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. . . , hlm. 15.

²³ Abuddin Nata, *Ilmu*. . . , hlm. 219.

²⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2012), hlm. 24.

Pemerintah, melalui amanat UU telah mengalokasikan 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) untuk pendidikan yang sebagian anggaran tersebut teralokasikan untuk pembiayaan dan operasional pendidikan non gaji yang oleh pemerintah dibungkus dengan beberapa program, antara lain bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Bantuan siswa miskin (BSM) dan bantuan-bantuan teknis lainnya. Namun bantuan-bantuan pemerintah tersebut dianggap masih terlalu kecil untuk dapat mengcover kegiatan kependidikan di banyak lembaga pendidikan. Akibatnya, banyak lembaga pendidikan yang harus memutar otak bagaimana mendapatkan sumber dana lain diluar dana yang telah digelontorkan oleh pemerintah.² Beberapa cara yang ditempuh oleh lembaga pendidikan dalam mensiasati kurangnya dana adalah pemanfaatan Komite sekolah, Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP), optimalisasi ekonomi lembaga, serta bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat.

Sumber Pembiayaan pendidikan di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 47 ayat 1 dan 2 berbunyi:

Ayat (1); “Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan, “Ayat (2) Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²⁵

Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah, orangtua dan masyarakat hal ini sesuai dengan undang-undang SISDIKNAS 2003. Esensi dalam sumber pembiayaan mencerminkan bahwa pembiayaan pendidikan tanggung jawab bersama, oleh karena itu, peran serta orangtua dan masyarakat dalam menunjang proses pendidikan di pertaruhkan.²⁶

Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam empat katagori, yaitu:

- a) Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termaksud didalamnya adalah semua penerimaan pemerintah disemua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 *Tentang SISDIKNAS*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 23-24.

²⁶ Jaenudin, *Reformasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 10.

pemerintah. Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat ataupun daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.

- b) Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF atau UNESCO, pajak khusus, pinjaman dari Bank Dunia dan sebagainya usaha khusus pemerintah untuk mengumpulkan dana yang hasil keseluruhnya atau sebagian diberikan untuk proses pendidikan.
- c) Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran dari orangtua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.
- d) Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang bersifat sukarela.

Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat dalam bentuk penempatan guru negeri yang dipekerjakan, bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan untuk menutup sebagian kecil kebutuhan sekolah.

Dalam dunia pendidikan Pesantren, dapat ditemukan beberapa sumber yang menjadi sumber biaya bagi pendidikan di pesantren. Sumber biaya pendidikan tersebut berasal dari:

1) Dana dari Para Santri (Siswa)

Orangtua memiliki kewajiban atau tugas untuk mendidik anak-anaknya. Oleh karenanya setiap orang yang membutuhkan pendidikan harus mengeluarkan biaya. Dana yang berasal dari para santri/siswa tergolong sangat stabil, hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- (a) Biaya pendidikan dipandang sebagai kewajiban bagi orangtua
- (b) Biaya pendidikan dipandang dapat mengangkat harkat dan martabat para siswa
- (c) Pengeluaran biaya pendidikan dipandang sebagai investasi yang menguntungkan, ia diyakini akan kembali dalam jumlah yang lebih besar semisal anak sukses dalam pekerjaannya

2) Dana Wakaf

Tujuan wakaf adalah untuk mengekalkan pokok dari suatu benda, sedangkan manfaat digunakan untuk kebaikan. Dalam sejarah wakaf mengalami perkembangan yang cukup pesat, bukan hanya tanah pertanian melainkan ruko, kebun, toko dan tanah.

3) Dana Kas Negara

Sumber biaya pendidikan lainnya adalah dana kas negara. Beberapa lembaga pendidikan besar terdahulu seperti Madrasah Al-Munrashiriyah di Baghdad, Darul Ilmi di Kairo yang mengambil dana kas negara untuk keperluan pembiayaan.

4) Dana dari Hibah Perorangan dan Lainnya

Beberapa lembaga pendidikan mendapatkan dana bantuan dari beberapa orang kaya atau berkecukupan yang dikenal sebagai donatur yang memberikan dana secara rutin. Lembaga pendidikan yang mendapatkan dana ini adalah lembaga yang dapat dipercaya, menghasilkan lulusan bermutu, memiliki visi, tujuan, sasaran, dan target serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, dana perorangan yang diberikan langsung untuk para pelajar.

Dengan menganalisis biaya satuan pendidikan, dimungkinkan untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan dana sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat untuk pendidikan. Juga dapat menilai bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya perbaikan dan peningkatan sistem pendidikan dalam satuan pendidikan.

Komponen pembiayaan dalam suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lainnya. Oleh karena itu manajemen pembiayaan diperlukan dalam lembaga-lembaga pendidikan, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.²⁷

²⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 47.

Terkait dengan kerja-kerja dalam manajemen pembiayaan, Thomas H Jhones melalui Mulyasa menyatakan bahwa ia dibagi menjadi tiga fase utama, yaitu *budgeting* (perencanaan), *implementation/accounting* (pelaksanaan), dan *evaluation/evaluating* (evaluasi).²⁸

Perencanaan (*budgeting*) pembiayaan pendidikan mencakup penyusunan anggaran belanja yang terdiri dari sumber pendapatan, pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, bahan dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.²⁹

Pada sebuah lembaga maupun organisasi apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peran yang lebih penting dibanding fungsi yang lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai suatu tujuan.

Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang sangat luas agar dapat menyusun sebuah rancangan yang dapat dijadikan sebagai pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.³⁰ Dalam perspektif Islam, menjelaskan bahwa terdapat ayat al-Qur'an yang dikaitkan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan. Berikut ayat al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Isra' ayat 36 berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَهُ مُسَدَّدًا

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.” (QS. Al Isra' [17]: 36)³¹

²⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. . . , hlm. 48.

²⁹ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 81.

³⁰ Udin Syaefuddin Sa'ud dan Abin Syamsudin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 46.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . , hlm. 285.

Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsip yang tidak boleh ditawar dalam proses perencanaan pembiayaan pendidikan, agar supaya tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai dengan sempurna.

Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang ada secara tidak efektif. *Kedua*, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. *Ketiga*, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. *Keempat*, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.

Berdasarkan perencanaan yang matang, efektifitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi dapat tertata, program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tetapi juga waktu.³² Pengembangan rencana pembiayaan yang akurat memungkinkan terciptanya penganggaran yang baik pula.

Perencanaan pembiayaan harus mempertimbangkan kondisi keuangan yang sesuai dengan perhitungan sistematis dan akurat. Pertimbangan tersebut dapat diperoleh melalui hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilakukan dan melihat potensi keuangan yang mungkin bisa dijalankan. Untuk menjalankan manajemen pembiayaan yang baik, perlu disusun perencanaan yang tepat dan akurat. Hal ini untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan yang baik pula.

Pelaksanaan (*accounting*) pembiayaan merupakan bagaimana melakukan pengalokasian, pengadaan dan pembelanjaan terhadap pembiayaan yang telah direncanakan. Dalam proses

³² Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 142.

pelaksanaannya dibutuhkan ketersediaan finansial dan tenaga yang mencukupi. Pelaksanaan ini mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh harus benar, efektif dan efisien.³³

Proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan prinsip membangun bersama sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sumber dana yang diperoleh didistribusikan sesuai dengan tempatnya masing-masing dengan catatan harus dilaksanakan tepat sasaran.

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan meliputi dua kegiatan, yaitu: penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan anggaran/ biaya. Penerimaan keuangan dari sumber-sumber pembiayaan dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan yang disepakati. Demikian pula dengan pengeluaran biaya pendidikan juga harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Berbagai sumber dana harus digunakan secara efektif dan efisien, artinya pengeluaran harus didasarkan atas kebutuhan-kebutuhan yang disesuaikan dengan perencanaan.³⁴

Pencatatan keuangan juga dianjurkan dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya” (QS. Al Baqarah [2] : 282)³⁵

³³ Sri Minarti, *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hlm. 239.

³⁴ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis . . .*, hlm. 81.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, . . .*, hlm. 48.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa bentuk transaksi keuangan pendidikan agar mampu menguatkan dan tidak menimbulkan keraguan atau perlu adanya transparansi. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana harus jelas dan juga hendaknya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Dengan begitu akan memudahkan bagi semua *stakeholder* yang bersangkutan dan yang memiliki kepentingan dengan pembiayaan tersebut.

Evaluasi (*evaluation*) dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dapat diidentifikasi dalam tiga hal, yakni: *Pertama*, pendekatan pengendalian alokasi dana. *Kedua*, bentuk pertanggungjawaban dana, seperti dilaksanakan dalam bentuk laporan bulanan atau triwulan, tahunan atau akhir periode. *Ketiga*, keterlibatan pengawasan dari pihak eksternal lembaga pendidikan.³⁶

Menurut Siagaan, pengawasan ada karena beberapa hal berikut ini³⁷:

- 1) Adanya orientasi kerja dalam setiap organisasi yaitu efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Dalam praktik, ketiga orientasi kerja tersebut diterapkan sekaligus karena memang berkaitan satu sama lain dan sangat diperlukan dalam menjalankan roda organisasi;
- 2) Pengawasan dilakukan *all of time* di berbagai kegiatan. Hal ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan. Artinya setiap manajer sebagai pelaksana fungsi pengawasan harus mampu mendeteksi berbagai petunjuk kemungkinan timbulnya berbagai hal negatif dalam menjalankan roda organisasi;
- 3) Adanya ketidaksempurnaan para pelaksana. Manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna memungkinkan untuk berbuat *khilaf*, bahkan berbuat kesalahan. Artinya, walaupun terjadi penyimpangan dari rencana atau pemborosan sekalipun, belum tentu

³⁶ E. Mulyasa, *Pedoman Manajemen Berbasis . . .*, hlm. 81.

³⁷ Sondang P. Siagaan, *Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 126-128.

bahwa hal-hal negatif itu terjadi karena kesengajaan, sebab sangat mungkin faktor lain yang menjadi penyebabnya, seperti kekurangan pengetahuan, atau faktor sejenis itu;

- 4) Adanya proses dasar pengawasan yang diketahui dan ditaati bersama. Proses dasar pengawasan yang dimaksud adalah, adanya standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan dan koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

Beberapa prinsip yang harus dipedomani oleh atasan langsung pengelola biaya dalam melaksanakan pengawasan yaitu³⁸:

- (a) Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus dilakukan terus menerus sebagai kegiatan rutin sehari-hari dan berkesinambungan
- (b) Pengawasan keuangan pendidikan harus dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan, dan kegiatan yang strategis
- (c) Pengawasan keuangan harus dilaksanakan secara komprehensif, cepat, tepat, tertib, dan didasarkan kepada penilaian yang obyektif terhadap penyimpangan yang terjadi melalui analisis yang tepat
- (d) Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas sehingga terhindar dari cara berfikir dan bertindak yang subyektif
- (e) Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus mencakup sub-subsistem pencatat dan pelaporan yang faktual, rasional dan tepat waktu agar mampu mendeteksi penyimpangan sedini mungkin.
- (f) Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus berorientasi kepada masa sekarang dan masa datang agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan terjadinya kesalahan
- (g) Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus bersifat edukatif yaitu membina setiap bawahan, termasuk kepada yang melakukan kesalahan dan penyimpangan

³⁸ Matin dan Nurhattati Fuad, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, . . ., hlm. 185.

- (h) Pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus mampu mencegah secara tuntas setiap masalah penyimpangan untuk terbinanya tertib pengelolaan anggaran dan kegiatan secara pasti dan konsisten.

Evaluasi pembiayaan pendidikan sebagai pertimbangan menurut seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya yaitu untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Konsep dasar evaluasi atau pengawasan terhadap penggunaan biaya pendidikan yaitu dapat mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia.

Adapun prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu: *Pertama*, transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan sumber dana dan jumlah rincian penggunaannya, pertanggungjawabannya jelas, sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah/madrasah atau pesantren. Selain itu transparansi juga dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.³⁹ Prinsip transparan dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan di lembaga pendidikan, misalnya bidang manajemen keuangan lembaga pendidikan. Dengan keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Penggunaan dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah/madrasah atau pesantren membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

³⁹ Fauzan, *Pengantar Sistem Administrasi Pendidikan: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 87.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam pembiayaan ini merupakan hubungan horizontal dan transdental, sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”. (QS. Al Anfal [8] : 27)⁴⁰

Melalui ayat ini dapat kita ketahui bahwa selain harus mentaati Allah dan Rasulnya, juga harus memberikan kepercayaan dengan memenuhi amanat yang telah diberikan. Dan salah satu implikasi dari memberikan kepercayaan yaitu dapat mempertanggungjawabkan terhadap amanat yang telah diberikan. Satu ayat ini memuat tiga aspek yaitu Allah, Rasul dan orang yang memberikan kepercayaan. Maka dari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kedudukan akuntabilitas dalam ajaran islam berkenaan dengan hubungan interaksi transdental dengan Tuhan maupun interaksi dengan sesama makhluk.

Ketiga, efektifitas. Efektifitas dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan dana dapat dikatakan memenuhi prinsip efektifitas apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur dan mengelola dana yang tersedia untuk membiayai aktifitas dalam mencapai tujuan pendidikan.⁴¹ Barometer terhadap efektivitas manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dapat dilihat dari kualitas program yang dibiayai, ketepatan pembiayaan, kepuasan pembiayaan, keluwesan proses pembiayaan, adaptasi dengan regulasi dan kebijakan yang memungkinkan penggalan dana yang lebih maksimal, pembiayaan memberikan efek semangat kerja dan motivasi, ketercapaian tujuan yang dibiayai, ketepatan waktu, serta ketepatan pendayagunaan biaya, dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan.⁴²

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, . . . , hlm. 180.

⁴¹ Fauzan, *Pengantar Sistem Administrasi* . . . , hlm. 87.

⁴² Arwildayanto, dkk., *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2017), hlm. 13.

Keempat, efisiensi. Efisiensi menekankan pada hasil suatu kegiatan. Efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Adapun dari segi hasil: kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.⁴³

Berdasarkan beberapa konsep pembiayaan pendidikan diatas dapat difahami bahwa pembiayaan pendidikan merupakan aktifitas penerimaan dana, pengalokasiannya dan evaluasi pendayagunaannya untuk mencapai tujuan kependidikan secara efektif dan efisien sehingga tercapai perbaikan dan peningkatan sistem pendidikan.

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan terselenggaranya pendidikan dalam suatu organisasi pendidikan baik sekolah, madrasah ataupun pesantren. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang terkait akan menentukan besaran dana yang dikeluarkan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu diperlukan manajemen pembiayaan yang tepat, efektif dan efisien. Hal ini dapat dicapai jika sistem penganggaran didasarkan pada suatu perencanaan yang matang kemudian dirinci ke dalam program untuk kemudian dialokasikan dana yang dibutuhkan.

Manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses untuk mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Manajemen pembiayaan pendidikan, jika ditarik dari konsepsi manajemen secara umum yang merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih secara terus menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan, yang dalam prosesnya meliputi perencanaan, pengorganisasian,

⁴³ Fauzan, *Pengantar Sistem Administrasi . . .*, hlm. 87.

pendelegasian dan evaluasi atau kontrol (POAC). Serta konsepsi pembiayaan pendidikan yang merupakan aktifitas penerimaan dana, pengalokasiannya dan evaluasi pendayagunaannya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien yang aktifitasnya meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi.⁴⁴

Maka manajemen pembiayaan pendidikan dapat dimaknai sebagai kerjasama antar *stakeholder* pendidikan dalam aktifitas terkait penerimaan dana pendidikan, distribusinya dan evaluasi terkait pembiayaan pendidikan untuk mencapai tujuan yang dicanangkan lembaga pendidikan, baik tujuan secara umum maupun spesifik secara tepat, efektif dan efisien.

Manajemen pembiayaan pesantren adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi pembiayaan pada lembaga pesantren. Fungsi pembiayaan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pesantren yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam. Fungsi manajemen pembiayaan adalah menggali dan mendapatkan biaya, menggunakan biaya, dan mempertanggungjawabkan biaya yang ada.

Jadi dalam kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban perlu dikelola secara efektif dan efisien agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pembiayaan ini tentunya harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan yakni transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

2. Pesantren

Pondok Pesantren merupakan gabungan dari kata pondok dan pesantren.⁴⁵ Sebelum tahun 1960-an, pusat-pusat pendidikan pesantren di Indonesia lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang bermakna hotel, tempat istirahat, ruang tidur, asrama atau tempat penginapan.⁴⁶

⁴⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. . . , hlm. 48.

⁴⁵ Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 80.

⁴⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya mengenai masa depan Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 41.

Menurut asal katanya pesantren berasal dari kata "santri" yang mendapat imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an" yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Sedangkan menurut C.C Berg, istilah santru berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari kata *shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama tentang ilmu pengetahuan.⁴⁷

Menurut istilah pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.⁴⁸

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah kedaulatan dari leadership seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri khas yang bersifat kharismatik serta independent dalam segala hal.⁴⁹

Pesantren, pondok pesantren, atau sering disingkat pondok atau ponpes, adalah sebuah asrama pendidikan tradisional, di mana para santrinya semua tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non-klasikal, di mana seorang kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-

⁴⁷ Ridlwan Nashir, *Mencari Tipologi*. . ., hlm. 80.

⁴⁸ Zulhimma, "Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia", dalam *Jurnal Darul 'Ilmi*, Vol. 01, No. 02 (2013), hlm. 166.

⁴⁹ Nur Efendi, *Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 111.

santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.⁵⁰

Kesimpulannya dapat ditarik bahwa pengertian dari pondok pesantren merupakan suatu tempat yang digunakan oleh para santri untuk menimba wawasan dan mengasah ilmu pengetahuannya di dalam lembaga tersebut. Pondok pesantren dikalangan masyarakat lebih dikenal dengan istilah sebutan “penjara suci”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka kita ketahui bahwa unsur terpenting bagi pesantren adalah adanya kyai, santri-santri, masjid, tempat tinggal (pondok) serta pengajaran buku-buku (kitab kuning). Penjelasannya sebagai berikut:

a. Kyai

Kyai merupakan gelar oleh seorang tokoh ahli agama, pimpinan pondok pesantren, guru dalam rangka ceramah, pemberi pengajian dan penafsir tentang peristiwa-peristiwa penting di dalam masyarakat sekitar. Kyai adalah tokoh sentral dalam satu pesantren, maju mundurnya pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai. Biasanya kyai itulah sebagai pendiri pesantren sehingga pertumbuhan pesantren tergantung pada kemampuan kyai sendiri. Namun, gelar kyai saat ini tidak lagi hanya diperuntukkan bagi yang memiliki pesantren. Gelar tersebut kini digunakan untuk seorang ulama yang mumpuni dalam bidang keagamaan walau ia tidak mempunyai pesantren. Bahkan gelar kyai digunakan untuk sebutan seorang Dai' atau Muballigh.

Kuatnya otoritas kyai dalam pesantren, maka mati hidupnya pesantren banyak ditentukan oleh kyai. Dalam kenyatannya, sebagian besar pesantren dapat menemukan bentuknya yang lebih mapan karena faktor manajemen kyainya. Adanya semangat kerja yang ikhlas dari kyai menjadikan pesantren disegani oleh masyarakat secara luas.⁵¹

b. Santri

⁵⁰ Nur Eka Setiowati, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. . ., hlm. 176.

⁵¹ Amiruddin Nahrawi, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 27.

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, biasanya terdiri dari dua kelompok; *Santri mukim*, ialah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam pondok pesantren. *Santri kalong*, yaitu santri-santri yang berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-masing setiap selesai mengikuti pelajaran di pesantren.⁵²

Dalam kehidupan kesehariannya mereka hidup dalam nuansa religius, karena penuh dengan amaliah keagamaan, seperti puasa, sholat malam dan sejenisnya, nuansa kemandirian karena harus mencuci, memasak makanan sendiri, nuansa kesederhanaan karena harus berpakaian dan tidur dengan apa adanya. Serta nuansa kedisiplinan yang tinggi, karena adanya penerapan peraturan-peraturan yang harus dipegang teguh setiap saat, bila ada yang melanggarnya akan dikenai hukuman, atau lebih dikenal dengan istilah ta'zirat seperti digundul, membersihkan kamar mandi dan lainnya.

c. Pondok/Asrama

Pondok merupakan tempat tinggal bersama antara kyai dengan para santrinya. Di pondok, seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar, sholat, makan, olah raga, tidur dan bahkan ronda malam.⁵³

Bangunan pondok pada tiap pesantren berbeda-beda, berapa jumlah unit bangunan secara keseluruhan yang ada pada setiap pesantren ini tidak bisa ditentukan, tergantung pada perkembangan dari pesantren tersebut. Pada umumnya pesantren membangun pondok secara tahap demi tahap, seiring dengan jumlah santri yang masuk dan menuntut ilmu di situ. Pembiayaannya pun berbeda-beda, ada yang didirikan atas biaya kyainya, atas kegotong royongan para santri, dari sumbangan masyarakat, atau bahkan sumbangan dari pemerintah.

Pondok sebagai tempat latihan bagi para santri agar mampu hidup mandiri dalam masyarakat. Ada tiga alasan utama mengapa pesantren harus menyediakan asrama bagi santrinya: *Pertama*,

⁵² Amiruddin Nahrawi, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. . . , hlm. 26.

⁵³ Nur Eka Setiowati, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. . . , hlm. 177.

kemasyhuran seorang kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam, menarik santri-santri dari jauh untuk dapat menggali ilmu dari kyai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama, untuk itu ia harus menetap. *Kedua*, hampir semua pesantren berada di desa-desa dimana tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup untuk menampung santri-santri, dengan demikian perlulah adanya asrama khusus para santri. *Ketiga*, ada timbal balik antara santri dan kyai, dimana para santri menganggap kyainya seolah-olah seperti bapaknya sendiri, sedang para kyai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi.

Alasan tersebut menunjukkan bahwa di pondok pesantren telah berlangsung sistem pembelajaran secara kekeluargaan. Ini merupakan fase penting dalam proses pembinaan akhlak bagi kader umat di masa depan. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang pertama mengembangkan lingkungan hidup dalam arti pengembangan sumber daya manusia dari segi moral dan akhlaknya.⁵⁴

d. Masjid

Masjid merupakan sentral kegiatan muslimin baik dalam dimensi ukhrawi maupun duniawi dalam ajaran Islam, disamping berfungsi sebagai tempat melakukan shalat berjamaah setiap waktu shalat, masjid juga berfungsi sebagai tempat belajar mengajar, *i'tikaf*, melaksanakan latihan-latihan (*riyadhah*) atau suluk dan dzikir maupun amalan-amalan lainnya dalam kehidupan thariqat dan sufi.⁵⁵

Dalam konteks yang luas, masjid merupakan pesantren pertama bagi santri. Bahkan seorang kyai yang hendak merintis pesantren biasanya pertama-tama akan mendirikan masjid di sekitar tempat tinggalnya.⁵⁶

e. Pengajaran Kitab-kitab Kuning/Klasik

⁵⁴ Amiruddin Nahrawi, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. . . , hlm. 24.

⁵⁵ Zulhimma, *Dinamika Perkembangan Pondok*. . . , hlm 171.

⁵⁶ Amiruddin Nahrawi, *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. . . , hlm. 25.

Salah satu ciri khusus yang membedakan pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain adalah adanya pengajaran kitab-kitab agama klasik yang berbahasa Arab, atau yang lebih populer disebut dengan “kitab kuning” .

Pengajaran kitab-kitab klasik diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia terhadap paham Islam tradisional. Karena itu kitab-kitab Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan paham pesantren yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Meskipun kini, dengan adanya berbagai pembaharuan yang dilakukan di pesantren dengan memasukkan pengajaran pengetahuan umum sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran kitab-kitab Islam klasik terutama karangan-karangan ulama yang menganut paham Syafi’iyah tetap diberikan di pesantren sebagai usaha untuk meneruskan tujuan utama pesantren, yaitu mendidik calon-calon ulama, yang setia kepada paham Islam tradisional.

Moh. Hasyim Munif mengatakan bahwa: “Ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab kuning tetap merupakan pedoman hidup dan kehidupan yang sah dan relevan. Sah artinya ajaran itu diyakini bersumber pada kitab Allah Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah (Al-Hadits), dan relevan artinya ajaran-ajaran itu masih tetap cocok dan berguna kini atau nanti”. Dengan demikian, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan hal utama di pesantren guna mencetak alumnus yang menguasai pengetahuan tentang Islam bahkan diharapkan di antaranya dapat menjadi Kyai.⁵⁷

Seiring perkembangan zaman, serta tuntutan masyarakat atas kebutuhan pendidikan Umum, kini banyak pesantren yang menyediakan menu pendidikan umum dalam pesantren. Kemudian muncul istilah pesantren Salaf dan pesantren Modern, pesantren Salaf adalah pesantren yang murni mengajarkan Pendidikan Agama sedangkan Pesantren Modern menggunakan sistem pengajaran pendidikan umum atau Kurikulum.

Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja umumnya disebut pesantren *salaf*. Walaupun basicnya tradisional, bukan berarti lulusan pesantren ini kurang memiliki kompetensi. Biasanya fokus penekanannya pada kurikulum Islam yang lebih kuat. Pola tradisional yang

⁵⁷ Nur Eka Setiowati, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. . . , hlm. 178.

diterapkan dalam pesantren *salafi* adalah para santri bekerja untuk kyai mereka bisa dengan mencangkul sawah, mengurus empang (kolam ikan), dan lain sebagainya, dan sebagai balasannya mereka diajari ilmu agama oleh kyai mereka tersebut.

Para santri, pada umumnya menghabiskan hingga 20 jam waktu sehari dengan penuh dengan kegiatan, dimulai dari salat shubuh di waktu pagi hingga mereka tidur kembali di waktu malam. Pada waktu siang, para santri pergi ke sekolah umum untuk belajar ilmu formal, pada waktu sore mereka menghadiri pengajian dengan kyai atau ustadz mereka untuk memperdalam pelajaran agama dan Al- Qur'an.⁵⁸

Kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam delapan kelompok jenis pengetahuan, yaitu 1) nahwu (*syntaz*) dan shorof (*morfologi*), 2) fikih, 3) ushulu al-fiqh, 4) hadis, 5) tafsir, 6) tauhid, 7) tasawuf dan etika, dan 8) cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Selain itu, kitab tersebut memiliki pula karakteristik teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari beberapa jilid dan tebal. Karakteristik tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kitab dasar, kitab tingkat menengah, dan kitab besar.⁵⁹

Adapun metode yang digunakan yakni *bandongan* dan *sorogan*. Bandongan dilakukan dengan cara kyai membacakan teks-teks kitab yang berbahasa Arab, menerjemahkannya ke dalam bahasa lokal dan menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya. Metode ini digunakan untuk memenuhi kompetensi kognitif santri dan memperluas khazanah keilmuan mereka.

Pengajaran *sorogan* di sini maksudnya adalah seorang kyai mengajar para santrinya secara bergiliran dari santri satu ke santri lainnya. Saat tiba gilirannya, santri mengulangi serta mengartikan kata yang sama persis dengan yang diucapkan kyai atau guru itu kepadanya. Metode penerjemahan ini dibuat supaya mereka bisa dengan mudah mengerti dan memahami baik dari segi arti ataupun fungsi kata dalam rangkaian kalimat dalam bahasa Arab.

⁵⁸ Nur Eka Setiowati, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. . ., hlm. 179.

⁵⁹ B. Marjani Alwi, "Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya", dalam *Lentera Pendidikan*, Vol. 16 No. 2 (2013), hlm. 209.

Dalam sistem itu, para santri harus melakukannya secara berulang-ulang dan hanya boleh menerima tambahan pelajaran apabila sudah mendalami atau menguasai pelajaran sebelumnya. *Sorogan* bisa diartikan sebagai sistem yang paling sulit dari keseluruhan sistem pengajaran yang ada di pesantren, hal ini disebabkan dalam sorogan para santri dituntut untuk sabar, rajin, taat, dan disiplin.⁶⁰

Dalam segi pembiayaan tentunya pesantren tradisional tidak semahal biaya di pesantren modern. Sebagian besar pesantren *salafi* menyediakan asrama sebagai tempat tinggal para santrinya dengan membebaskan biaya yang rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Biaya di pesantren salaf cenderung lebih murah. Keberadaan pesantren pun bermula dari dukungan masyarakat sekitar. Terkadang bangunan pesantren berbaur dengan perumahan penduduk. Karena pembiayaan cenderung mandiri, maka bangunan dan fasilitas pesantren salaf sederhana saja.⁶¹

Pesantren *kholafiyah* atau modern merupakan pengembangan dari pesantren *salafiyah* atau tradisional yang mana didalamnya dikorelasikan dengan kemajuan zaman. Perkembangan teknologi yang begitu pesat mendorong pesantren untuk mengikutinya. Akhirnya pesantren ini didirikan dengan tujuan membantu santri agar mampu memiliki ketrampilan intelektual muslim berazaskan Islam. Pesantren *kholafiyah* dimaksudkan untuk upaya melahirkan pribadi yang berkarakter nilai-nilai pesantren tapi menguasai ilmu-ilmu modern yang selaras dengan perkembangan zaman.

Pesantren *Kholaf* atau yang disebut juga pesantren modern yaitu pendidikan yang menerapkan sistem pengajaran klasikal (madrasah), memberikan ilmu umum dan agama, serta juga memberikan pendidikan keterampilan. Pesantren yang telah melakukan pembaharuan (modernisasi) dalam sistem pendidikan, kelembagaan, pemikiran dan fungsi.

Perubahan metode pembelajaran dari bentuk halaqah kepada sistem klasikal merupakan konsekuensi dari perubahan kelembagaan pendidikan Islam yang menuntut penyesuaian metode

⁶⁰ Gatot Krisdiyanto, dkk, "Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Modernitas", dalam *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 01. (2019), hlm. 17.

⁶¹ <https://www.datdut.com/ciri-pesantren-salaf-modern-salafi/> diakses tanggal 19 Januari 2021.

pembelajaran. Perubahan tersebut mengakibatkan berubahnya bentuk hubungan guru dan murid yang bersifat personal.⁶²

Kemudian dalam hal manajemen, manajemen pesantren kholafiyah sudah tertata dengan baik. Visi misi jelas serta struktur yang rapi berikut dengan tugas yang diembannya. Hal lain yang terlihat dari pesantren kholafiyah yakni penggunaan bahasa Arab dan Inggris. Kedua bahasa itu dijadikan sebagai bahasa keseharian yang wajib dikerjakan oleh santri. Berbeda dengan pesantren salafiyah yang masih menggunakan bahasa Jawa. Selain itu, di pesantren kholafiyah juga telah diterapkan sebuah kurikulum. Kurikulum yang dibuat dimaksudkan untuk mendorong santrinya agar selalu berkembang. Penetapan kurikulum ini dipandang komprehensif oleh sebagian masyarakat karena mengandung nilai-nilai pendidikan umum berbasis agama.

Namun, dalam penghormatan terhadap kyai tidak begitu kaku sebagaimana di pesantren salafiyah. Bahkan dalam batas-batas tertentu penghormatannya semakin berkurang. Selain itu juga penguasaan terhadap khazanah klasik bahkan mayoritas out put pesantren tidak mampu membaca kitab klasik dengan standart yang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam pesantren salafiyah. Di pesantren kholafiyah juga disediakan fasilitas yang lengkap. Mereka tidak memasak dan mencuci (sebagian pesantren) karena sudah ada yang menanganinya. Oleh karenanya biaya pendidikan di pesantren kholafiyah cenderung lebih mahal jika dibandingkan pesantren salafiyah.

Pesantren-pesantren modern ini tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Ada beberapa estimasi biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan diantaranya ada biaya masuk atau uang pangkal mulai dari Rp.10 juta hingga Rp.30 juta, biaya boarding bulanan (termasuk makan, laundry, SPP dan sebagainya) mulai dari Rp.2 juta, biaya buku, kegiatan ekstra kurikuler dan sebagainya, mulai dari Rp.2 juta, biasanya dibayarkan per semester. Bahkan pesantren modern yang memiliki kelas internasional ada yang menetapkan SPP nya hingga 20 jutaan per bulan. Biasanya yang masuk ke pesantren jenis ini adalah kalangan ekonomi atas.

Besarnya biaya biasanya dipengaruhi jenjang pendidikan, lokasi dan akreditasi sekolah, dan popularitas sekolah. Pesantren modern yang belum begitu populer dan belum memberikan

⁶² Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 204.

garansi lulusannya diterima di kampus luar negeri biasanya kisaran biaya masuk masih di bawah Rp.10 juta. Termasuk juga uang SPP nya yang bisa lebih murah di bawah Rp.1 juta.⁶³

Biaya di pesantren modern atau kholaf cenderung lebih mahal karena tuntutan sistem pendidikan yang lebih maju, bangunan dan infrastuktur pun lebih megah dan lengkap.

B. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab (Klaten, Jawa Tengah). Sedangkan obyek penelitian ini adalah tentang manajemen pembiayaan yang ada di pesantren tersebut. Oleh Karena itu, selain berdasarkan pada survei dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada kajian serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui tesis dan jurnal sebagai berikut:

1. Penelitian tesis Eny Masruroh dengan Judul **Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru (Studi pada Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar)**. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, dilembaga tersebut meliputi penentuan rancangan anggaran, menentukan sumber dana, dan penyusunan serta pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). Adapun Program peningkatan kualitas guru yang dilakukan diantaranya memperhatikan penyeleksian penerimaan guru, melakukan beberapa program pengembangan guru dan meningkatkan kesejahteraan guru. (2) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, meliputi dua kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Jenis pembukuan yang digunakan yaitu buku kas umum. (3) Evaluasi pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru terdapat dua bentuk, evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh yayasan yang meliputi evaluasi bulanan dan tahunan, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh pemerintah.⁶⁴

⁶³ <https://pintek.id/blog/biaya-masuk-pondok-pesantren/> diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

⁶⁴ Eny Masruroh, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Guru (Studi pada Pondok Pesantren “Wali Songo” Ngabar)”, (IAIN Ponorogo, 2019).

Pada penelitian ini, terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama meneliti tentang manajemen pembiayaan dan merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian Eny fokusnya pada pembiayaan untuk meningkatkan kualitas guru sedangkan penulis memfokuskan pada studi gratis biaya yang diberlakukan di pesantren gratis Ubay Bin Ka'ab.

2. Penelitian tesis Agus Lestari, dengan judul **Manajemen Pembiayaan Terpadu (Studi Atas Yayasan Pondok Pesantren Darul Fallah Sukorejo Ponorogo)**. Penelitian ini memfokuskan pada proses pembuatan kebijakan manajemen pembiayaan terpadu dan ruang lingkup manajemen pembiayaan terpadu di YPPDF. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Manajemen Pembiayaan terpadu di YPPDF sesuai dengan *flat grant* model dan *equalization* model. *Flat grant* model mendistribusikan dana ke masing-masing lembaga tanpa mempertimbangkan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh setiap lembaga. Pembagian dana mempertimbangkan perbedaan variasi *unit cost* untuk program pelayanan pendidikan yang berbeda. *Equalization* model, dalam model ini dana lembaga pendidikan yang melimpah dialokasikan bagi lembaga pendidikan yang sedikit pemasukannya. Dalam model ini yang lebih untuk biaya per-murid, per-guru, atau unit-unit lainnya yang perlu dialokasikan bagi lembaga yang kurang memiliki sumber yang kurang atau menengah agar tetap biasa melaksanakan program pendidikan dengan baik. Perumusan kebijakan pembiayaan terpadu di YPPDF sesuai dengan teori rasional, dengan mempertimbangkan *cost-benefit analysis*, analisis ini berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya atau distribusi anggaran kepada seluruh sub-sub sektor pendidikan berdasarkan kemanfaatan. 2) Ruang lingkup manajemen pembiayaan terpadu YPPDF Sukorejo Ponorogo meliputi proses perencanaan anggaran (*budgeting*), penatausahaan keuangan (*accounting*) dan pemeriksaan penggunaan anggaran (*auditing*).⁶⁵

Pada penelitian ini, terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama meneliti tentang manajemen pembiayaan dan merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian Agus memfokuskan pada manajemen pembiayaan yang

⁶⁵ Agus Lestari, "Manajemen Pembiayaan Terpadu (Studi Atas Yayasan Pondok Pesantren Darul Fallah Sukorejo Ponorogo)", (IAIN Ponorogo, 2017).

terpadu sedangkan penulis memfokuskan pada studi gratis biaya yang diberlakukan di pesantren gratis Ubay Bin Ka'ab.

3. Penelitian tesis Sutrimo Purnomo dengan Judul **Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)**. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan di TPQ Al-Ittihad bersifat fungsional religius kultural dengan tahapan pembiayaannya, meliputi: *Pertama*, perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan tahapan analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan masyarakat yang berasaskan musyawarah untuk mufakat. *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan melalui penggerakan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi dan koordinasi, serta penjabaran program dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. *Ketiga*, evaluasi pembiayaan pendidikan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara rencana anggaran belanja dan realisasi penggunaannya dengan prinsip transparansi anggaran.⁶⁶

Pada penelitian ini, terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama meneliti tentang pembiayaan dan merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian Sutrimo memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pembiayaannya dan lokasi penelitian di TPQ sedangkan penulis akan memfokuskan pada studi gratis biaya yang diberlakukan di pesantren gratis Ubay Bin Ka'ab.

4. Karya Ilmiah Badruttamam dengan judul **“Manajemen Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam Nurul Karomah Bangkalan”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, sumber-sumber dana pendidikan di Ponpes Nurul Karomah Bangkalan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sumber yang paling utama dalam pembiayaan pendidikan di Ponpes Nurul Karomah Bangkalan berasal dari iuran wajib (SPP) yang dibayarkan siswa kepada sekolah yang telah ditetapkan Ponpes Nurul Karomah Bangkalan. Dalam hal pengelolaan Pembiayaan, pengelolaan Pembiayaan sekolah di Ponpes Nurul Karomah Bangkalan adalah di kelola kepala sekolah, guru

⁶⁶ Sutrimo Purnomo, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Ittihad Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)”, (IAIN Purwokerto, 2017).

berpengalaman (senior) yang telah ditunjuk oleh sekolah yang dibantu tenaga administrasi, dan para anggota komite sekolah. Secara khusus, pengendalian anggaran di Ponpes Nurul Karomah Bangkalan terdiri dari serangkaian kegiatan pemeriksaan dan persetujuan untuk memastikan bahwa: Dana dibelanjakan sesuai rencana, Ada kelonggaran dalam penganggaran untuk pembayaran pajak, Pembelanjaan dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan dana tidak dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui atau diberikan kepada pihak penerima tanpa persetujuan.⁶⁷

Pada penelitian ini, terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama meneliti tentang pembiayaan dan merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni penulis memfokuskan pada studi gratis biaya yang diberlakukan di pesantren gratis Ubay Bin Ka'ab.

5. Karya Ilmiah Akhmad Shunhaji, dkk, dengan judul “**Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor**”. Adapun temuan penelitian ini adalah, 1) Kebijakan sistem pembiayaan pada Pondok Pesantren Darul Muttaqien dirancang oleh pimpinan pondok pesantren yang terdiri dari ketua yayasan, wakil pimpinan pondok, dan bendahara pondok. 2) Pelaksanaan sistem pembiayaan Pondok Pesantren Darul Muttaqien mulai berlaku sejak tahun ajaran 2018-2019. 3) Dalam mengimplementasikan kebijakan system pembiayaan masih memiliki berapa kendala diantaranya; a) kurangnya sosialisasi penggunaan sistem dari manual ke online, b) kurangnya pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan sistem pembiayaan, c) kurangnya perangkat yang menunjang sistem pembiayaan.⁶⁸

Pada penelitian ini, terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yakni sama-sama meneliti tentang pembiayaan dan sama-sama berlatar belakang pesantren serta merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yakni penulis memfokuskan pada studi gratis biaya yang diberlakukan di pesantren gratis Ubay Bin Ka'ab.

⁶⁷ Badruttamam, “Manajemen Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Islam Nurul Karomah Bangkalan”, dalam *Jurnal Kabilah*, Vol. 3 No. 1, Juni 2018.

⁶⁸ Akhmad Shunhaji, dkk, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor”, dalam *Andragogi Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 2, No. 1, Tahun 2020.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, maka jelas sudah persamaan dan perbedaannya. Adapun penelitian ini fokusnya yakni akan mengkaji tentang manajemen pembiayaan yang ada di Pesantren Ubay Bin Ka'ab dimana pesantren tersebut menggratiskan biaya untuk para santrinya. Meskipun beberapa diantaranya sama-sama mengkaji manajemen pembiayaan di pesantren, namun dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan pada penggratisan biaya yang ada di di Pesantren Ubay Bin Ka'ab, bagaimanakah mengatur uang yang bersumber bukan dari para santri/wali santrinya. Lalu apa sajakah varian pembiayaan yang di Pesantren, kemudian apa saja faktor pendukung dan penghambatnya dalam pembiayaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan jenis penelitian kualitatif, suatu pendekatan deskriptif analisis yakni menggunakan uraian naratif mengenai suatu proses pemikiran subyek sesuai masalah yang diteliti. Artinya, data yang terkumpul sebagian besar berbentuk kata-kata dan tidak menekankan pada data berbentuk angka.⁶⁹ Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan realita tentang manajemen pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁷⁰ Dalam hal ini tentunya pendeskripsian tentang manajemen pembiayaan yang berpusat pada ke-gratis-an yang ada di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab.

Didukung juga dengan penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, arsip, Rencana Kegiatan Anggaran Pesantren dan referensi lainnya. Serta mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Manajemen Pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pesantren Gratis Ubay bin Ka'ab tepatnya di Desa Tempel RT 1 RW 5 Kelurahan Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Klaten Jawa Tengah. Alasan peneliti tertarik untuk

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 9.

⁷⁰ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 54.

meneliti di Pesantren ini ada beberapa hal diantaranya; karena berkaitan dengan judul tesis yang penulis angkat yakni Manajemen Pembiayaan, dimana biaya pada suatu pesantren umumnya bersumber dari wali santri. Namun di pesantren ini karena basicnya memang pesantren gratis maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah manajemen pembiayaan yang ada di pesantren tersebut. Dari manakah dana yang didapatkan, kemudian bagaimana mengalokasikan dana yang didapat dan bagaimana pengawasan serta pertanggungjawaban atas dana yang digunakan. Alasan lainnya yakni adanya pembatasan kuota santri guna menjaga kualitas lulusan serta karena keterbatasan tempat dan SDM yang ada. Pesantren ini lebih mengutamakan pada anak-anak yatim kemudian baru dhuafa-nya.

Adapun waktu penelitian yakni sejak dari penyusunan proposal tesis yakni bulan November 2020. Pelaksanaan ke pesantren serta penyusunan instrumennya sebagai pedoman untuk meneliti lebih jauh yakni dilaksanakan pada semester genap tahun 2021 tepatnya bulan Januari.

C. Informan/Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁷¹ Dalam hal ini variabel yang diteliti ialah manajemen pembiayaan. Untuk mengetahui mengenai manajemen pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay bin Ka'ab, maka peneliti membutuhkan informan/subjek yang mengetahui tentang pembiayaan di pesantren. Ustadz Ashali selaku ketua Yayasan Bina Insani yang menaungi Pesantren Gratis. Beliau juga yang handle seluruh dana-dana yang masuk serta mengetahui persis pengeluaran dana-dana tersebut. Kemudian informan selanjutnya yakni ada Ustadz Achmad selaku IT dan bendahara sekaligus sekretaris Yayasan. Nah untuk yang dari pesantren sendiri ada Ustadz Ibrahim, beliau selaku bendahara dan kesartrian pesantren. Pasti mengetahui tentang pembiayaan yang ada di pesantren.

D. Teknik Pengumpulan Data

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 400.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷² Dalam penelitian kualitatif ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁷³ Peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan, dan diman tempatnya. Peneliti akan melakukan observasi terkait kondisi sarana dan prasarana, kondisi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kondisi pembelajaran santri. Observasi ini berguna untuk melihat secara nyata kondisi Pondok Pesantren Gratis sebagai bukti kepuasan dan keberhasilan dari proses manajemen pembiayaan dalam kebijakan gratis.

Interview atau wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁴

Sebelum mengumpulkan data dengan melakukan teknik wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan. Wawancara yang akan dilakukan peneliti ditujukan kepada ketua yayasan, bendahara yayasan serta bendahara pesantren. Alasan peneliti melakukan wawancara kepada subjek diatas adalah semua subjek diatas merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana pesantren.

Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis wawancara mendalam dan bebas terpimpin. Wawancara mendalam karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dan wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur dan selanjutnya memperdalam satu per satu untuk mengorek keterangan lebih lanjut tentang Manajemen Pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet ke-duapuluhlima, (Bandung:Alfabeta, 2017), hlm. 308.

⁷³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 220.

⁷⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 317.

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam penelitian ini, akan didapatkan dokumen-dokumen terkait proses manajemen pembiayaan di Pesantren Gratis Ubay Bin Ka'ab. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang sifatnya dokumenter seperti: sejarah berdirinya sekolah, letak geografis, struktur organisasi, keadaan guru dan siswa serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah serta dokumen-dokumen tentang kegiatan pembiayaan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa peneliti akan menggunakan tiga prosedur utama, yaitu wawancara mendalam dengan mendatangi langsung narasumber dalam setting natural, observasi dengan partisipasi langsung di lapangan, serta dokumentasi melalui telaah dokumen keuangan lembaga, otorisasi penyaluran dana, serta dokumen penyusunan anggaran.

E. Keabsahan Data

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁷⁵

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi teknik dan sumber. Dengan triangulasi teknik, peneliti berupaya membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, dan sebagainya. Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat diperoleh data yang kredibel. Adapun triangulasi sumber digunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap keabsahan dan validitas data yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan yang lain dalam hal ini tentunya antara ketua yayasan, bendahara yayasan dan bendahara pesantren.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. . . , hlm. 372.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁷⁶ Analisis data dalam penelitian kualitatif dengan menata, menyusun, dan memberi makna pada kumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan dan bahan lainnya sehingga memudahkan untuk diinformasikan kepada orang lain. Analisis ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan, dilakukan sejak awal mulai penelitian hingga akhir penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁷⁷

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang masih kompleks dipilih agar lebih fokus terhadap fokus penelitian. Data disini tentunya mengenai manajemen pembiayaan di pesantren gratis Ubay Bin Ka'ab.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yakni penyajian data. Dalam penyajian data, penulis lebih banyak menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif-naratif (menggambarkan dan menceritakan). Tidak hanya dalam bentuk teks naratif, penyajian data yang penulis lakukan juga dalam bentuk uraian singkat, bagan maupun tabel. Dari data-data tersebut, penulis mengelompokannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dilakukanlah analisis secara mendalam apakah ada keterkaitan antara data-data tersebut.

Langkah terakhir yakni penarikan kesimpulan. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Data Conclusion Drawing Verification*). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, dalam langkah ini setelah data direduksi dan disajikan kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan yang diambil diharapkan merupakan temuan baru yang

⁷⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, cet pertama, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁷⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122.

sebelumnya belum ada dan dapat menggambarkan hasil penelitian yang ada terkait dengan manajemen pembiayaan secara umum dan manajemen pembiayaan di pesantren gratis secara khusus.

